

PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEMPENGARUHI AFILIASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILUKADA 2024 (STUDI KASUS KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO)

Farid Abdillah¹, Baktiawan Nusanto²

¹²³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Junii, 2025

faridabdillah729@gmail.com,
baktiawannusanto@unmhjembe.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

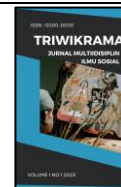
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran tokoh agama dalam mempengaruhi afiliasi politik masyarakat dalam konteks Pemilukada 2024 di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, faktor-faktor apakah yang menyebabkan pengaruh tokoh agama sangat dominan dalam pemilukada tahun 2024? Dengan menggunakan pendekatan teori konflik karya Ralf Dahrendorf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif dengan model studi kasus merupakan penelitian yang mendalam untuk memahami fenomena tertentu dalam konteks yang nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh dari tokoh agama sangat signifikan dalam pembentukan afiliasi politik dan proses pengambilan keputusan masyarakat di tingkat lokal, hal tersebut di karenakan tokoh agama tidak hanya berfungsi sebagai pemuka keagamaan, tetapi juga sebagai figur yang memengaruhi keputusan politik masyarakat secara otomatis, tulus dan turun-temurun melalui kekuatan moral dan hubungan emosional yang terbangun.

Kata Kunci: Tokoh agama, afiliasi politik, pengaruh sosial.

ABSTRACT

This study aims to examine the role of religious leaders in influencing people's political affiliations in the context of the 2024 regional elections in Panji District, Situbondo Regency. The formulation of the problem in this study is, what factors cause the influence of religious figures to be very dominant in the 2024 elections? By using Ralf Dahrendorf's conflict theory approach. The method used in this research uses qualitative research with a case study model, which is an in-depth study to understand certain phenomena in a real context. The results showed that the influence of religious figures is very significant in the formation of political affiliations and the decision-making process of the community at the local level, this is because religious figures not only function as religious leaders, but also as figures who influence people's political decisions automatically, sincerely and for generations through moral strength and emotional relationships that are built.

Keywords: Religious Figures, Political Affiliation, Sosial influence



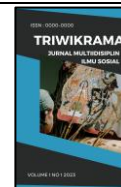
1. PENDAHULUAN

Tokoh agama adalah individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam ajaran atau ilmu keagamaan. Mereka sering dianggap sebagai pemimpin nonformal yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat untuk memberikan pemahaman serta bimbingan dalam aspek spiritual dan moral. Dalam konteks Islam, tokoh agama biasanya merujuk pada ulama, habib, kiai, dan ustad yang memiliki wawasan mendalam tentang ajaran Islam guna mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat negara Indonesia memiliki jumlah penduduk islam terbanyak ke dua dunia (salim, 2024). Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama islam dengan total 207 juta penduduk atau 87,2% populasi umat muslim di Indonesia (Samarinda, 2024). Hal ini membuat peran tokoh agama tidak bisa di kesampingkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Seiring dengan perubahan dinamika sosial di masyarakat, peran tokoh agama kini tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan saja, melainkan juga memiliki pengaruh penting dalam bidang politik. Hal ini terlihat di daerah dengan kultur keagamaan yang kuat, seperti Kabupaten Situbondo, di mana banyak tokoh agama dan pesantren yang berdiri. Kondisi ini membuat pandangan politik yang disampaikan tokoh agama menjadi sangat diperhatikan oleh masyarakat. Masyarakat Situbondo yang memiliki tradisi menghormati kiai menjadikan ucapan mereka diikuti oleh sebagian besar warga, termasuk dalam ranah politik. Keyakinan kultural masyarakat Situbondo dapat dilihat dari budaya Madura yang sangat menjunjung tinggi penghormatan kepada orang tua, guru, dan pemimpin. Umumnya nilai ungkapan “Bepak, Bebuk, Guru, Rato” (Bapak, Ibu, Guru, Pemimpin) (Isroni, 2019). Berdasarkan ungkapan tersebut membuat masyarakat memiliki hubungan ketergantungan terhadap pengaruh dalam pandangan termasuk dalam ranah politik yang di lakukan oleh tokoh agama.

Afiliasi politik merujuk pada hubungan antara individu atau kelompok dengan partai politik atau kandidat tertentu, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Istilah ini berasal dari kata “affiliate” yang berarti bergabung atau terhubung. Dalam konteks politik, afiliasi diartikan sebagai dukungan terhadap partai politik dalam pemilihan umum, di mana individu atau kelompok memilih untuk berasosiasi dengan partai tertentu berdasarkan kesamaan nilai, ideologi, atau kepentingan. Afiliasi politik tidak hanya mencerminkan pilihan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya. Salah satu faktor yang memengaruhi afiliasi politik adalah latar belakang pendidikan dan pengalaman hidup individu. Afiliasi politik dapat terlihat dari keterikatan dengan calon kepala daerah atau partai politik, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keputusan pemilih dalam kontestasi pilkada.

Pilkada (pemilihan kepala daerah) adalah proses pemilihan langsung oleh masyarakat untuk memilih pemimpin daerah di Indonesia, seperti gubernur, bupati, atau wali kota beserta wakilnya, yang akan memimpin wilayah tersebut selama masa jabatan lima tahun. Pilkada dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan hasil, hingga pelantikan. Proses ini diatur oleh undang-undang agar pelaksanaannya berjalan secara adil, jujur, dan demokratis. Pelaksanaan pilkada diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 56 ayat (1) menyebutkan, “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil” (Syafuruddin & Hasanah, 2022). Dengan keberadaan Undang-Undang tersebut, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diwajibkan untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pilkada di tingkat Provinsi serta Kabupaten atau Kota. Dalam prosesnya, Pilkada menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah peran tokoh agama yang berpengaruh



dalam memengaruhi partisipasi pemilih dalam memilih calon kepala daerah. Pengaruh ini dapat dipengaruhi oleh kondisi kultur atau budaya lokal di wilayah tersebut.

Kultur merujuk pada pola hidup seseorang, baik individu maupun kelompok, yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Kultur meliputi berbagai aspek, salah satunya adalah agama. Khususnya di Kabupaten Situbondo, yang dikenal sebagai kota santri dengan ratusan pesantren yang berdiri di sana, masyarakatnya cenderung menjalankan aktivitas berdasarkan kultur daerah yang kuat dengan nilai-nilai keagamaan tersebut. Masyarakat situbondo memiliki kecenderungan untuk selalu bersikap sangat santun dan patuh sami'na wa ato'na (kami mendengar dan mematuhi) terhadap ucapan dan isyarat kiai, bahkan memiliki kecenderungan untuk selalu melibatkan (tergantung) dalam persoalan keseharian (muhamad, 2024). Dalam konteks pilkada, pengaruh kultur menggambarkan bagaimana nilai-nilai budaya lokal, tradisi, dan pola hubungan sosial memegang peranan penting dalam membentuk dinamika politik serta perspektif pemilih. Oleh karena itu, kultur dapat memengaruhi sikap pemilih melalui berbagai strategi yang digunakan dalam memilih calon pada pilkada.

Dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Situbondo, terutama di Kecamatan Panji, peran tokoh agama sangat krusial dalam menentukan kemenangan calon. Hal ini terjadi karena tokoh agama menjadi faktor penting dalam keberhasilan seorang calon, dimana pada Pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2024, salah satu calon memperoleh dukungan dari beberapa tokoh agama dan pondok pesantren. dukungan kultur Pondok Pesantren Wali Songo, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan Pondok Pesantren Nurul Jadid (Feriyanto, 2024). Sekretaris majelis pakar DPC partai persatuan Pembangunan (PPP) kabupaten situbondo mahmudi kepada antara mengetahui bahwa jika ingin menang dalam pada pemilihan di wilayah itu harus mendapat restu dan dukungan salah satu atau dari kedua tokoh. Peta di situbondo masih seperti itu. Siapa yang di dukung oleh pondok pesantren sukorejo(timur) dan kiai kholil(barat) itu yang akan jadi, tanpa itu sangat sulit (noer, 2015). Dan hal ini juga terbukti pada pemilihan bupati 2024 di mana salah satu paslon mendapat dukungan dari 2 partai yang di balik layarnya terdapat 2 tokoh agama atau pesantren. pada pilkada periode sebelumnya ke dua partai ini sering berbeda dalam menentukan calonnya masing-masing, pada pilkada tahun 2024 bersatunya kekuatan ke dua partai terbukti membuat calon lain kalah dalam kontestasi pilkada (feriyanto, 2024). 20 tahun tidak Bersatu, bersatunya kedua partai memiliki tujuan mulia, di kami hanya ada keinginan untuk bersama. Selama ini hanya ada kejenuhan di masyarakat terkotak-kotak hanya urusan kutub politik (barat dan timur) (feriyanto, 2024). Kemenangan ini karena koalisi besar dan mendapatkan dukungan dari partai kultur dan partai nasionalis yang mempunyai basis yang tersebar luas di kabupaten situbondo (Feriyanto, 2024). Hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa masyarakat mungkin lebih memilih calon pemimpin berdasarkan pengaruh tokoh agama daripada mempertimbangkan latar belakang, visi, dan misi calon tersebut dan dapat mengurangi kualitas partisipasi politik masyarakat. Hal itu merupakan salah satu contoh yang mempengaruhi dalam pemilihan kepala daerah kabupaten situbondo, sehingga hal tersebutlah yang menjadi fokus penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

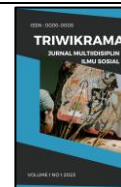
Pembahasan Teori

Teori Konflik

Teori konflik sebagian muncul sebagai tanggapan terhadap fungsionalisme struktural dan berbagai kritik yang telah dibahas sebelumnya. Akar teori ini berasal dari sejumlah sumber,

*Corresponding author

E-mail addresses: faridabdillah729@gmail.com



termasuk teori Marx dan pemikiran tentang konflik sosial dari Simmel. Pada era 1950-an dan 1960-an, teori konflik menjadi alternatif terhadap pendekatan fungsionalisme struktural. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, teori ini mulai tergeser oleh berbagai teori neo-Marxis. Salah satu sumbangan penting dari teori konflik adalah memberikan dasar bagi perkembangan teori-teori yang lebih menekankan pemikiran Marx. Kendala utama dari teori konflik adalah ketidakmampuannya melepaskan diri sepenuhnya dari akar-akar fungsionalisme struktural. Secara keseluruhan, teori ini lebih menyerupai bentuk fungsionalisme struktural yang bersifat kritis dan angkuh, daripada benar-benar menjadi teori yang secara mendalam mengkritisi struktur masyarakat.

Kaum fungsionalis umumnya memandang bahwa masyarakat terikat secara informal melalui norma, nilai, dan moralitas. Sebaliknya, para teoritis konflik berpendapat bahwa keteraturan dalam masyarakat muncul sebagai hasil dari pemaksaan oleh kelompok yang memiliki kekuasaan terhadap anggota masyarakat lainnya. Jika fungsionalis menitikberatkan pada kohesi sosial yang lahir dari nilai-nilai bersama, maka teoritis konflik menekankan pentingnya peran kekuasaan dalam menjaga ketertiban sosial.

(Dahrendorf, 1959,1968) adalah tokoh utama berpendapat bahwa masyarakat memiliki dua sisi, yaitu konflik dan konsensus. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar teori sosiologi dibagi menjadi dua bagian teori konflik dan teori konsensus. Teoritis konsensus perlu menelaah nilai-nilai yang menciptakan integrasi sosial, sementara teoritis konflik harus fokus pada konflik kepentingan serta penggunaan kekuasaan atau kekerasan yang menyatukan masyarakat dalam situasi penuh tekanan. Dahrendorf juga menekankan bahwa masyarakat tidak mungkin eksis tanpa kehadiran konflik dan konsensus yang saling berkaitan dan saling memerlukan. Artinya, konflik tidak akan muncul jika sebelumnya tidak ada konsensus. Sebagai contoh, seorang wanita Prancis sangat kecil kemungkinannya mengalami konflik dengan seorang pemain catur dari Chili karena keduanya tidak memiliki interaksi ataupun integrasi sebelumnya yang dapat menjadi dasar bagi munculnya konflik. Sebaliknya, konflik juga bisa menjadi sumber terbentuknya konsensus dan integrasi, seperti dalam kasus terbentuknya aliansi antara Amerika Serikat dan Jepang setelah Perang Dunia II.

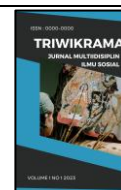
2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif dengan model studi kasus merupakan penelitian yang mendalam untuk memahami fenomena yang unik dalam konteks yang nyata, studi kasus sering di gunakan dalam berbagai bidang, termasuk Pendidikan, kesehatan dan ilmu sosial. Menurut Hartley dalam (salmaa, 2023) Penelitian studi kasus terdiri atas penyelidikan-penyelidikan yang terperinci, berkaitan dengan periode waktu, konteks, dan fenomena.

Dari subjek penelitian yang digunakan. Tujuan penelitian studi kasus adalah untuk memberikan hasil analisis mengenai konteks yang berhubungan dengan proses yang berkaitan dengan isu permasalahan tersebut. Maka dengan demikian penelitian jenis kualitatif dengan model studi kasus cocok untuk membahas terkait dengan judul “ Peran Tokoh Agama Dalam Mempengaruhi Afiliasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada 2024 (Studi di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait peran tokoh agama dalam mempengaruhi afiliasi politik dalam pemilukada tahun 2024. Dapat di simpulkan bahwa peran tokoh agama sangat berpengaruh dalam memng afiliasi masyarakat dalam pemilukada tahun 2024 kecamatan panji,



kabupaten situbondo. Dapat di simpulkan juga mengacu pada teori konflik karya dahrendorf sebagai berikut:

1. Otoritas

Tokoh agama di masyarakat Panji memiliki otoritas kuat yang dihormati karena kepercayaan moral dan spiritual. Pengaruhnya tidak memaksa, tetapi berasal dari ikatan emosional dan keyakinan masyarakat terhadap nilai-nilai keimanan. Mereka tetap dihormati dan diikuti dalam berbagai situasi politik, menunjukkan kekuatan otoritas simbolik yang besar dalam mempengaruhi keputusan masyarakat.

2. Legitimasi

Masyarakat di kecamatan panji Sebagian besar sangat menghormati tokoh agama. Kepercayaan ini membuat masyarakat mengikuti arahan tokoh agama tanpa paksaan, karena mereka merasa tokoh agama mampu menjaga nilai-nilai keimanan dan moral. Pengaruh ini membuat tokoh agama menjadi figur yang sah dan diterima secara sosial, sehingga keputusan politik masyarakat sering kali didasarkan pada kepercayaan dan keyakinan terhadap otoritas simbolik mereka.

3. Koersi

Koersi di kecamatan panji menunjukkan pengaruh tokoh agama dalam masyarakat Panji tidak bersifat memaksa secara langsung atau keras. Masyarakat taat dan mengikuti arahan tokoh agama bukan karena dipaksa secara fisik, tetapi karena adanya tekanan sosial dan rasa hormat terhadap nilai-nilai yang dianut, sehingga pengaruh tersebut berjalan secara halus dan tidak terlihat sebagai paksaan langsung.

Kepentingan

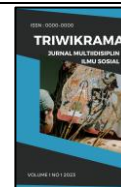
Indikator kepentingan menunjukkan bahwa tokoh agama di kecamatan Panji sangat peduli untuk menjaga nilai-nilai moral dan keagamaan yang mereka yakini. Mereka berusaha memastikan bahwa pilihan politik masyarakat sesuai dengan ajaran agama dan moral yang mereka pegang, sehingga masyarakat tidak hanya mengikuti karena merasa hormat, tetapi juga karena ingin mendapatkan keberkahan dan kebaikan bersama. Dengan begitu, tokoh agama memiliki peran penting dalam mempengaruhi preferensi politik masyarakat dengan cara yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan.

5. Peran konflik dalam perubahan struktural

Peran konflik dalam perubahan struktural, diperoleh kesimpulan bahwa tokoh agama, seperti kiai, memiliki kepercayaan dan keyakinan besar dari masyarakat terhadap kemampuan mereka dalam memahami kondisi lokal dan mengambil keputusan terbaik untuk kemajuan daerah. Masyarakat menyerahkan tanggung jawab politik kepada tokoh agama karena dianggap kompeten dan memiliki niat baik. Selain itu, keberadaan tokoh agama yang terlibat dalam politik tidak selalu menimbulkan konflik negatif; justru, dukungan mereka dapat memperkuat cohesi sosial dan memotivasi partisipasi politik masyarakat. Dengan demikian, konflik yang muncul dalam dinamika politik di wilayah tersebut, apabila dikelola dengan baik, dapat menjadi proses yang mendorong perubahan positif dan memperkuat kohesi sosial di masyarakat.

6. Dominasi

Kesimpulan dari indikator dominasi menunjukkan bahwa tokoh agama di masyarakat Panji memiliki kekuasaan yang kuat dan dihormati tanpa harus melakukan tindakan keras atau paksaan langsung. Mereka lebih berpengaruh secara simbolik melalui norma dan nilai yang dianut masyarakat. Kepercayaan yang tinggi terhadap tokoh agama membuat masyarakat mengikuti arahan mereka secara sukarela, karena merasa bahwa tokoh agama merupakan sosok



yang dipercaya dan dihormati, sehingga kekuasaan mereka bersifat halus dan tidak terlihat sebagai kekuasaan yang memaksa.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tokoh agama memiliki pengaruh yang sangat besar dan kuat dalam membentuk pilihan politik masyarakat di Kecamatan Panji. Mereka tidak memaksakan, tetapi lebih berpengaruh secara simbolik melalui nilai-nilai keagamaan, moral, dan hubungan emosional yang kuat. Masyarakat cenderung mengikuti arahan tokoh agama karena kepercayaan dan rasa hormat yang tinggi, sehingga keputusan politik mereka didasarkan pada otoritas moral dan spiritual, bukan pada pertimbangan rasional atau tekanan langsung. Kekuasaan tokoh agama ini bersifat halus dan simbolik, tetapi sangat efektif karena berakar pada keyakinan dan norma yang diyakini masyarakat sebagai bagian dari struktur sosial budaya mereka.

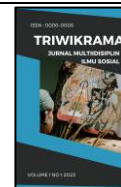
Saran

1. Untuk mengurangi dominasi simbolik tokoh agama yang dapat menimbulkan ketergantungan berlebihan, disarankan agar masyarakat lebih diajarkan untuk memahami proses politik secara rasional dan kritis, sehingga mereka tidak hanya mengikuti secara emosional tetapi juga mampu menilai secara objektif setiap calon dan programnya.
2. Pemerintah dan lembaga terkait perlu lebih aktif dalam mendorong transparansi dan pengawasan agar kekuasaan simbolik tokoh agama tidak menjadi monopoli dalam pengambilan keputusan politik, dan tercapai mekanisme checks and balances yang sehat.
3. Agar tidak terjadi ketergantungan yang berlebihan pada tokoh agama, sebaiknya diperkuat peran dan keberpihakan kelompok sosial lain seperti pemuda, perempuan, dan komunitas non-keagamaan sehingga tercipta relasi kekuasaan yang lebih beragam dan inklusif.
4. Masyarakat perlu diajarkan untuk memahami bahwa dominasi kultural harus selalu dikawal agar tidak berubah menjadi kekuasaan yang menindas atau menghambat pluralisme dan keberagaman dalam berpolitik, sesuai dengan prinsip keadilan sosial.
5. Peran konflik dalam perubahan struktural, disarankan agar tokoh agama dan masyarakat dapat meningkatkan pengelolaan konflik secara konstruktif melalui komunikasi yang terbuka dan dialog yang saling menghormati. Pengembangan mekanisme penyelesaian konflik yang melibatkan semua pihak secara adil diperlukan untuk mencegah ketegangan berkepanjangan dan memperkuat solidaritas sosial. Selain itu, penting bagi tokoh agama untuk terus mempertahankan integritas dan kejelasan peran mereka dalam pembangunan sosial dan politik agar konflik yang timbul dapat diubah menjadi peluang untuk memperkuat perubahan positif dan memperkuat kohesi masyarakat di masa mendatang.
6. Pendidikan politik yang menitikberatkan pada demokrasi, partisipasi aktif, dan keterbukaan sangat penting agar masyarakat tidak hanya mengikuti norma-norma simbolik, tetapi juga memahami hak dan kewajibannya dalam berpolitik secara adil dan seimbang, sehingga mengurangi risiko konflik sosial yang berlebihan.

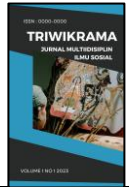
5. DAFTAR PUSTAKA

Cahyani, N. M., Apriani, K. D., & Prahmana, G. I. (2024). Strategi Pemenangan Politik Tambat dalam Pilkada Kabupaten Jember. *jurnal ilmu politik*, 1-8.

Collins, R. (1975). *Conflict Sociology*. New York: New York Academic Press.



- Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford: Stanford University Press.
- Dahrendorf, R. (1959,1968). *Essays in the Theory of Society*. . Stanfod: Stanford University Press.
- Dhofier, Z. (2011). "Tradisi pesantren : studi tentang pandangan hidup kyai". *LP3ES*, 4.
- feriyanto, I. (2024, 12 25). *radar situbondo.id*. Diambil kembali dari radar situbondo: <https://radarsitubondo.jawapos.com/politik-pemerintahan/2005044234/ppp-dan-pkb-bersatu-setelah-20-tahun-daftarkan-rio-dan-ulfi-di-pilkada-situbondo-2024>
- Feriyanto, I. (2024, 12 2). *Radar Situbondo.id*. Diambil kembali dari Radar Situbondo: <https://radarsitubondo.jawapos.com/politik-pemerintahan/2005377509/rio-ulfi-unggul-di-11-kecamatan-situbondo-bung-karna-nyai-khoi-menang-di-5-kecamatan>
- gaspar, n. a., waworundeng, w., & kumayas, n. (2023). Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Bitung Digital City (DC) Di. *Jurnal Governance*, 3.
- Isroni, M. (2019). kota santri, bumi shalawat nariyah dan bule -dhika: reproduksi kebudayaan pendalungan dalam kontruksi identitas. *al-hikmah*, 14.
- muhamad, n. (2024, 08 08). *databoks*. Diambil kembali dari databoks: <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024>
- noer, c. h. (2015, 1 15). *antara jatim*. Diambil kembali dari antara jatim news: <https://jatim.antaranews.com/berita/150467/kiai-timur-dan-barat-di-pilkada-situbondo>
- Novarismansyah, M. R. (2014, 12 2). *ebizmarkblog*. Diambil kembali dari ebizmark.id: <https://ebizmark.id/artikel/snowball-sampling-pengertian-tujuan-jenis-tahapan/>
- Nugroho, B. A. (2021). PERUBAHAN PERAN AGAMA DI MASYARAKAT DALAM ASPEK POLITIK.: *OSFPREPRINT*, 1-9.
- Nusanto, B. (2017). PROGRAM PENANGANAN GELANDANGAN. *jurnal politico*, 9.
- Partasari, Y., Masyhur, & Fikri, M. (2021). Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik di Pilkada 2018 di . *politic and islamic cilization*, 1-10.
- Prasetiyo, A., & Kosandi, M. (2024). Peran Kiai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati . *SYNTAX ADMIRATION*, 1-12.
- Riyanto, G., Indriyanti, N., Kusumarani, A. D., Ahmad, M. S., & Arifin, I. (2024). Politik Simbolisme Agama dalam Kampanye Pemilu. *Jurnal Edukasi dan Ilmu Sosial*, 1-6.
- salim, m. p. (2024, 9 19). *liputan6.com*. Diambil kembali dari liputan6.com: <https://www.liputan6.com/hot/read/5701027/10-negara-islam-terbesar-di-dunia-berdasar-populasi-2024-indonesia-tak-lagi-berada-di-puncak?page=2>
- salmaa. (2023, 6 8). *penerbitdeependublish.com*. Diambil kembali dari penerbitdeependublish.com: <https://penerbitdeependublish.com/penelitian-studi-kasus/>



Samarinda, B. P. (2024, 05 17). *Agama di Indonesia*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Kota Samarinda: <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzI0IzE=/agama-di-indonesia-2024.html>

SITUBONDO, S. W. (2018, 8 4). *Sejarah berdirinya STIQ*. Diambil kembali dari Sejarah berdirinya STIQ WALISONGO SITUBONDO: <https://stiqwalisongo.ac.id/sejarah-berdirinya-stiq/#:~:text=Dalam%20usianya%2019%20tahun%20ini,yang%20cukup%20untuk%20belajar%20santri.>

Syafruddin, & Hasanah, S. (2022). Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4.